

**OPTIMALISASI PERAN KORAMIL DALAM PEMBERDAYAAN
WILAYAH PERTAHANAN GUNA
MEMPERKOKOH KETAHANAN WILAYAH
(Studi Di Koramil 2102/Cibinong Dan Koramil 2104/Citeureup)**

Asis Wanto

Lemhannas RI

Email: Sulisjiane@yahoo.co.id

ABSTRACT

This paper explained the Koramil's role as the frontline of the regional unity command and deserved special attention, due to the Koramil's role as supporter and activator all over the regions to embodied the people's defense. The qualitative data showed the Koramil in Bogor Regency encounter various obstacles in conducting their duties which made the lack of optimal services. These were due to the lack of transportation devices, communication devices, facilities and infrastructures, minimum budget support, and limited human resources and personnel.

Keywords: *Koramil, Establishment, and Regional Resilience.*

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang peran Koramil yang merupakan ujung tombak dari satuan komando kewilayahan sudah saatnya mendapat perhatian khusus, karena Koramil merupakan pendorong dan penggerak di semua pelosok daerah dalam mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta. Dengan menggunakan data kualitatif, ditemukan bahwa Koramil-koramil yang berada di Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya untuk pemberdayaan wilayah pertahanan masih mengalami banyak kendala sehingga tugasnya kurang optimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat transportasi, alat komunikasi, sarana dan prasarana, dukungan anggaran yang sangat minim serta jumlah personil dan sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas.

Kata Kunci: *Koramil, Pemberdayaan, dan Ketahanan Wilayah.*

PENGANTAR

Peran Koramil dalam proses pemberdayaan wilayah pertahanan sangat strategis guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Sistem pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan semesta sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Secara substansial undang-undang

tersebut mengamanatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung (Samego, 2001).

Dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara terutama dalam

pemberdayaan wilayah pertahanan, Koramil belum dapat melaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang kurang fokus sehingga perlu dilakukan penelitian secara komprehensif. Komando kewilayahan di dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan masih mengalami banyak kendala dan hambatan (Mabesad, 2005).

Komando kewilayahan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan pembinaan teritorial di daerah Koramil, juga mendapat tugas untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi ancaman musuh seperti infiltrasi, pendaratan musuh maupun pendudukan oleh musuh. Dengan seluruh kekuatannya Koramil mengkomunikasikan kepada komponen masyarakat dan instansi terkait tentang rencana pemberdayaan wilayah pertahanan guna mendapat dukungan dari rakyat dan seluruh komponen untuk menghadapi tantangan dan meniadakan ancaman tersebut, Koramil juga memiliki jaringan kerjasama dan koordinasi kegiatan intelijen antar instansi, untuk dapat saling memberikan informasi dan menganalisis situasi berdasarkan skala prioritas dalam pembangunan daerah dengan mengedepankan aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan wilayah. (Pusat Teritorial TNIAD, 2000)

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas dan untuk mendukung pelaksanaan pertahanan negara, maka perlu adanya upaya nyata oleh Koramil sebagai ujung tombak TNI-AD dalam rangka mendukung dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Oleh karena itu Koramil sebagai satuan teritorial dalam mendukung tugas pokok TNI-AD perlu dikaji peran dan tugasnya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna memperkokoh ketahanan wilayah.

PEMBAHASAN

Koramil 2102/Cibinong

Kondisi wilayah Koramil 2102/Cibinong terletak di Kecamatan Cibinong sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 4.242.023 Ha. Jumlah personil di Koramil 2102/Cibinong yang ada saat ini berjumlah 18 (delapan belas) orang.

Penduduk Cibinong berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Cibinong sebesar 344.712 jiwa. Sebaran penduduk di wilayah Koramil 2102/Cibinong menunjukkan sebaran yang tidak merata, sehingga saat ini menjadi padat penduduk dan banyak yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) dan pekerjaan tetap di wilayah Cibinong, keberadaan Koramil 2102/Cibinong sangat didukung oleh masyarakat sekitarnya karena Koramil senantiasa dapat menyatu dengan masyarakat, baik pada kegiatan karya bakti, komunikasi sosial maupun bantuan cepat bila ada suatu bencana di wilayahnya.

Babinsa yang berada di desa-desa juga mendapat dukungan dari masyarakat untuk membantu keamanan desa, dan penggerak dalam kegiatan karya bakti, kepramukaan serta komunikasi dengan para tokoh masyarakat. Dengan munculnya banyak pendatang yang berusaha menguasai perekonomian mereka, masyarakat menjadi semakin lemah dan tak berdaya bila ditinjau dari ketahanan wilayah, Cibinong cukup rawan terhadap kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat sehingga akan melemahkan terhadap ketahanan wilayah. Babinsa yang merupakan ujung tombak Koramil dalam mencari data, mendeteksi dini dan cegah dini setiap kejadian yang menghambat pertahanan

wilayah hanya mendapatkan dana kodal setiap bulannya sebesar Rp50.000,00, (*lima puluh ribu rupiah*), padahal tugas dan tanggungjawab yang diemban sangat besar.

Sumber kekayaan alam di wilayah Koramil 2102/Cibinong berupa pertanian, sumber mata air. Namun karena pengelolannya yang kurang baik sehingga sumber daya alam yang tersedia banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sehingga kesejahteraan masyarakat tidak merata. Terdapat pabrik-pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Cibinong, terdapat juga bendungan dan irigasi untuk pengairan persawahan masyarakat yang dapat juga digunakan sebagai tempat latihan TNI untuk berenang dan latihan menggunakan perahu *landing craft robber* (LCR) untuk bantuan bencana alam.

Masyarakat Cibinong pada umumnya masih memahami dan menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan survey tercermin dalam perilaku masyarakat yang mengutamakan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kehidupan politik masyarakat Cibinong dapat berjalan aman dan dapat memberikan pelajaran berpolitik pada masyarakat luas. Namun demikian masyarakatnya masih rentan terhadap hasutan-hasutan dan penggalangan-penggalangan dari partai politik tertentu sehingga mudah bagi masyarakat untuk ikut melakukan anarkhis dan tindakan yang melawan hukum, bila hal ini tidak diantisipasi secara terus menerus dibina, dan dipantau perkembangannya maka akan melemahkan ketahanan wilayah.

Keadaan ekonomi masyarakat di wilayah Koramil 2102/ Cibinong pada sektor produksi

terus meningkat, begitu juga pada sektor jasa lainnya telah berkembang lebih maju. Namun demikian terjadi suatu perubahan pola cara berfikir dan gaya hidup masyarakat yang mengarah pada budaya barat dan bersifat konsumtif, menguatnya budaya primordial menjadikan masyarakat semakin tersekat-sekat yang didasarkan pada kelompok etnis, agama dan kelompok lainnya sehingga di kalangan masyarakat masih banyak pengangguran dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, hal ini akan menimbulkan pergesekan dan kecemburuan sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat. Apabila kondisi ini dibiarkan maka akan berimplikasi terhadap menurunnya ketahanan wilayah.

Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di Koramil 2102/ Cibinong, dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan teritorial (binter), komunikasi sosial, bakti TNI dan melaksanakan 5 (lima) kemampuan teritorial yaitu: kemampuan deteksi dini, lapor cepat dan cegah dini; kemampuan manajemen teritorial; kemampuan penguasaan wilayah; kemampuan perlawanan rakyat, dan kemampuan komunikasi sosial dalam rangka terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pembinaan teritorial diarahkan untuk mendata dan mencatat potensi yang ada di wilayah Cibinong, melaksanakan pencatatan terhadap keadaan geografi, demograsi, sumber kekayaan alam dan kondisi sosial yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Komunikasi sosial yang dilakukan oleh Koramil dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat agar terjalin hubungan yang akrab dengan harapan mampu menggugah, mendorong dan membangkitkan serta mengajak pihak-pihak terkait dan masyarakat agar ikut berpartisipasi untuk melaksanakan

kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan. Bakti TNI yang dilaksanakan oleh Koramil 2102/ Cibinong dilaksanakan melalui kegiatan karya bakti yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal. (Mabesad, 2006&2007)

Penerapan lima kemampuan teritorial tersebut merupakan wujud nyata dari penjabaran dan penghayatan serta pengamalan Pancasila, sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI yang berada di Koramil 2102/Cibinong. Lima kemampuan teritorial yang dilaksanakan adalah melaksanakan kemampuan temu cepat dan lapor cepat, melaksanakan manajemen teritorial, penguasaan wilayah, melaksanakan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan rakyat, melatih untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul dan melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para aparat kelurahan agar tercipta kemandirian TNI dan rakyat. (Mabesad, 2006)

Pengorganisasian Dan Pengendalian

Pengorganisasian Koramil 2102/ Cibinong dilakukan dalam rangka sinkronisasi program pembinaan teritorial Koramil dengan program pembangunan di kecamatan dan kelurahan. Kerjasama antara kecamatan dan Koramil Cibinong dapat terlaksana dengan baik, sebagai tindak lanjut pengendalian dalam pembinaan teritorial dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan wilayah pertahanan oleh Koramil Cibinong berdasarkan laporan dari Babinsa maupun dari masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan sehingga menjadi bahan masukan untuk program berikutnya agar lebih baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Koramil 2102/ Cibinong masih kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan, karena dihadapkan dengan jumlah anggota Babinsa dengan jumlah desa yang ada masih belum memadai untuk mewujudkan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kecamatan Cibinong.

Penganggaran

Anggaran pertahanan yang diberikan kepada Koramil diarahkan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial secara terbatas yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan deteksi dini dan lapor cepat, melaksanakan komunikasi sosial dengan para tokoh agama, pemuda, tokoh adat dan kepala suku di wilayahnya serta untuk kegiatan karya bakti dan memberikan wawasan kebangsaan. Namun demikian anggaran yang sampai pada Koramil untuk pemberdayaan wilayah pertahanan jumlahnya sangat minim, baik untuk keperluan yang mendukung sarana dan prasarana latihan maupun untuk kegiatan pembinaan teritorial.

Secara umum anggaran yang diberikan masih terbatas pada insentif yang diberikan kepada Babinsa yang sedang bertugas di desa-desa, sesuai hasil wawancara dengan anggota Koramil Cibinong a.n. Serka Mulyono bahwa dukungan yang diberikan Babinsa tiap bulan selain gaji dan uang lauk pauk (ULP) sebesar Rp. 50.000,00, (*lima puluh ribu rupiah*) dalam kegiatan untuk satu bulan, padahal Babinsa harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah ke kantor Koramil maupun sampai ketempat tugas. Babinsa harus mengeluarkan dana extra untuk menanggulangi transportasi setiap hari membeli bahan bakar minyak (BBM) dan membeli pulsa untuk komunikasi.

Perencanaan, Koordinasi Dan Pengembangan Organisasi

Dalam perencanaan dan koordinasi untuk pemberdayaan wilayah pertahanan diperlukan adanya kejelasan tataran wewenang dalam membuat perencanaan di lingkungan Koramil. Penyelenggaraan dan perencanaan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi pada tahap perencanaan awal oleh pihak yang terkait. (Suradinata, 1996); Bujuklak, 2009)

Pengembangan organisasi Koramil perlu dikembangkan yang disesuaikan dengan adanya pengembangan pemekaran wilayah, sehingga personil Koramil dan Babinsa juga perlu ditambah, dengan harapan tiap 1 (satu) desa ada Babinsa 1 (satu) orang sehingga dapat bekerjasama dengan kepala desa, dan Babinpol desa. Terutama dalam memonitor perkembangan situasi wilayah terhadap kemungkinan ancaman yang akan datang serta bersama-sama masyarakat setempat untuk ikut melaksanakan dan menyukseskan pembangunan di wilayahnya.

Jumlah personel Koramil 2102/Cibinong yang ada saat ini belum sesuai dengan jumlah desa; anggota yang ada saat ini 18 orang termasuk Danramil, di samping itu perlunya pengembangan karier bagi para anggota koramil untuk melaksanakan pendidikan teritorial dan pendidikan intelijen secara berjenjang.

Koramil 2104/Citeureup

Demikian juga keadaan kondisi di wilayah Koramil 2104/Citeureup terletak di Kecamatan Citeureup sebagai salah satu kecamatan dari Kabupaten Bogor. Jumlah personil di Koramil 2104/Citeureup yang ada saat ini berjumlah 29 (dua puluh sembilan)

orang dan desa binaan terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Babakan Madang sebanyak 24 desa dan jaraknya desa satu dengan desa lainnya cukup jauh.

Sebaran penduduk di wilayah Koramil Citeureup menunjukkan sebaran yang tidak merata, dimana konsentrasi penduduk terdapat di Desa Citeureup, dan Kecamatan Babakan Madang, sehingga banyak yang tidak punya pekerjaan tetap.

Sumber kekayaan alam di wilayah Koramil 2104/Citeureup terdapat sumber daya alam dan sumber daya buatan potensi sumber daya alam yang cukup banyak membantu kehidupan masyarakat Citeureup untuk menopang kesejahteraan keluarga. Namun karena pengelolaannya yang kurang baik sehingga sumber daya alam yang tersedia banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sehingga kesejahteraan masyarakat tidak merata.

Di wilayah Citeureup banyak jalan-jalan diperkeras yang memudahkan untuk pendistribusian bahan makanan pokok dan makanan pendukung yang dapat disalurkan dari desa-desa ke Kecamatan Citeureup. Keberadaan Koramil 2104/Citeureup sangat didukung oleh sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang berada di wilayah kecamatan.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat TNI khususnya Koramil Citeureup dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan rutin di tingkat kelurahan bersama instansi terkait yang dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat setempat.

Kondisi ekonomi di wilayah Koramil 2104 Citeureup mempunyai potensi yang positif karena terdapat beberapa pabrik yang

terus berkembang, potensi ekonomi pada sektor produksi, begitu juga pada sektor jasa lainnya telah berkembang lebih maju, namun di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang semangkin baik, juga terdapat kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang semakin lebar antara kelompok masyarakat yang kaya dengan kelompok masyarakat yang miskin, hal ini akan menimbulkan pergesekan dan kecemburuan sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik dimasyarakat.

Masyarakat Citeureup pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam, kondisi sosial dan budaya yang sangat beragam, tetapi dapat juga menjadi peluang bagi terjadinya peristiwaperistiwa yang bersifat primordial. Sebagian dari mereka terutama akar rumput (*grass-root*) sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan atau musuhnya. Namun situasi ini dapat berubah bila terjadi adanya pemicu konflik yang biasanya karena adanya campur tangan dari pihak luar terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan antar umat beragama, antar etnis dan antar golongan, hal ini dapat dilihat masih adanya kenakalan remaja seperti perkelahian antar remaja, perkelahian antar kampung, apabila hal ini dibiarkan dan tidak ada pembinaan maka akan melemahkan terhadap ketahanan wilayah.

Koramil 2104/Citeureup dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan melaksanakan kegiatan melalui pembinaan teritorial (binter), komunikasi sosial, bakti TNI dan melaksanakan 5 (lima) kemampuan teritorial dalam rangka terwujudnya kemandirian TNI dengan rakyat.

Pembinaan teritorial diarahkan untuk mendata dan mencatat sebagai data base di wilayah Citeureup. Wilayah Citeureup mempunyai banyak jalan pendekat untuk menuju daerah tertentu dan cocok untuk rute gerilya. Demikian pula pelaksanaan bakti TNI melalui karya bakti yang dilaksanakan secara rutin dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta penerapan lima kemampuan teritorial.

Pengorganisasian Dan Pengendalian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Koramil 2104/ Citeureup sudah efektif dan pengendalian setiap pelaksanaan kegiatan. Namun dihadapkan dengan jumlah anggota Babinsa dengan jumlah desa yang ada sebanyak 24 desa masih belum memadai untuk mewujudkan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah kecamatan citeureup, hal ini karena luas wilayah dan jarak jangkauan dari koramil ke desa sangat jauh.

Pengendalian kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dibuat dalam program tahunan yang dijabarkan sampai pada program bulanan, mingguan dan harian, hal ini agar setiap kegiatan koramil dan jajarannya dapat terorganisir dan terkendali dengan baik sesuai dengan rencana untuk pemberdayaan wilayah pertahanan.

Penganggaran

Anggaran yang didukung pada Koramil 2104/Citeureup hampir sama dengan Koramil lainnya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan proses penyusunan anggaran yang terkait dengan pertahanan sangat bergantung pada penilaian dari situasi lingkungan dan ancaman yang ada. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa

besarkah ketersediaan alokasi anggaran negara untuk Koramil 2104/Citeureup.

Saat ini banyak di kalangan masyarakat sipil masih mengeluhkan soal transparansi dan akuntabilitas anggaran yang diberikan kepada TNI dikarenakan masih tertutupnya akses informasi terhadap anggaran pertahanan. Padahal, isu anggaran pertahanan di Indonesia adalah isu yang sangat penting karena terkait erat dengan efektivitas implementasinya mengingat dari dulu hingga kini masih banyak terjadi penyalahgunaan ataupun buruknya tata kelola penggunaan anggaran.

Optimalisasi Peran Dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Koramil 2102/Cibinong

Pertama, perencanaan, koordinasi dan pengembangan organisasi. Optimalisasi Koramil 2102/Cibinong dalam perencanaan dan koordinasi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan diperlukan adanya kejelasan tataran wewenang tahapan manajemen di lingkungan Koramil. Penyelenggaraan dan perencanaan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi pada tahap perencanaan awal. Rapat awal tentang rencana pembuatan dan penggunaan anggaran memang telah dilaksanakan, namun secara rinci apa saja yang akan dialokasikan anggaran untuk pemberdayaan wilayah pertahanan seringkali tidak transparan dan tidak sesuai dengan harapan dengan rencana aparat teritorial di daerah, hal ini dikarenakan dalam rapat perencanaan penentuan anggaran tidak melibatkan aparat teritorial, kegiatan Koramil di daerah sebagai pejabat teritorial tidak pernah dimasukkan dalam perwakilan yang bersama-sama muspika lainnya ikut sidang untuk

bicara dalam menentukan dan memutuskan apa saja dukungan yang dianggarkan untuk pemberdayaan wilayah pertahanan.

Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara terprogram dalam bentuk pendidikan dan latihan pada lembaga formal maupun non formal di instansi satuan masing-masing dengan meningkatkan kemampuan dasar perorangan keprajuritan yang sudah tercantum dalam program latihan maupun dalam program pendidikan sehingga kemampuannya dapat dipergunakan setiap saat untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang akan terjadi.

Kedua, gelar satuan. Dalam hal kekuatan pertahanan, kekuatan teritorial sebagai alat deteksi dini yang mampu dengan cepat mengetahui dan selanjutnya mengatasi persoalan yang timbul di daerah sesuai dengan kapasitas kemampuannya sambil menunggu datangnya bantuan dari pusat. Keberadaan Koramil sangat diperlukan mengingat kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sulit terjangkau sampai ke daerah-daerah sedangkan dalam hal keamanan dan kekuatan, sebagai keseimbangan untuk meningkatkan keamanan di masyarakat diperlukan pengembangan satuan komando teritorial yang memadai sesuai dengan pemekaran wilayah.

Langkah yang telah ditempuh selama ini baru sebatas pemenuhan kuantitas, belum menyentuh masalah kualitas yang diperlukan, oleh karena itu di samping memenuhi gelar satuan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas personil yang bertugas di Koramil, sehingga diharapkan pengerahan komponen cadangan dapat masuk ke dalam struktur komando teritorial karena belum ada aturan dan kejelasan dalam undang-undang RI yang mengatur hal tersebut.

Satuan komando kewilayahan dalam melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan, diperlukan peningkatan kekuatan dari unsur satuan dalam bentuk satuan cadangan di masing-masing wilayah yang siap diperbantukan untuk mempertahankan wilayahnya. Dalam kondisi damai ancaman militer menjadi kecil kemungkinannya, maka kekuatan yang ada digunakan untuk mengatasi ancaman nir militer yaitu dalam membantu pemerintah di daerah, di antaranya dalam penanggulangan konflik, bencana alam dan berbagai permasalahan keamanan dan pertahanan wilayah dimasyarakat. Oleh karena itu untuk menambah kekuatan satgas Koramil, maka diperlukan penggandaan kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung, melalui kegiatan mengorganisir relawan Linmas dalam mendukung ketahanan wilayah.

Dalam membantu keamanan diwilayah Koramil Cibinong, harus mampu dengan cepat untuk digerakkan di semua sasaran di seluruh wilayah Koramil. Kecepatan untuk sampai di sasaran dapat berlangsung, diperlukan alat transportasi yang memadai namun satuan tersebut tidak memiliki sarana angkutan yang cukup untuk menuju sasaran, tetapi saat ini masih dalam upaya pengajuan, sedangkan daerah dan titik-titik rawan bencana cukup banyak dan luas, oleh karena itu diperlukan pengaturan gelar satuan tugas yang disiagakan dan dikordinasikan dengan kelurahan dan para tokoh masyarakat setempat.

Ketiga, pendanaan dan pengendalian program. Salah satu faktor penunjang terwujudnya kemampuan pertahanan dan keamanan adalah adanya daya dukung anggaran. Alokasi dukungan anggaran pertahanan untuk satuan di tingkat Koramil sangat minim sekali, bila dibandingkan dengan dukungan anggaran

pertahanan negara lain dukungan anggaran bagi satuan Koramil adalah yang paling rendah sehingga anggaran untuk komando teritorial tidak mencukupi, padahal tugas yang diemban cukup besar.

Pendanaan dan pengendalian program kegiatan di Koramil dikendalikan oleh jadwal kegiatan yang ada, kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan anggaran yang rasional. Anggaran satuan kewilayahan untuk alokasi pemberdayaan wilayah pertahanan saat ini masih sangat terbatas, karena dukungan anggaran yang ada hanya sebatas untuk sosialisasi untuk dua instansi saja, padahal sosialisasi pemberdayaan wilayah pertahanan seharusnya dilakukan pada semua komponen masyarakat, pelajar, mahasiswa, birokrasi, karyawan swasta, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga diharapkan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dimengerti, dipahami dan tumbuh kesadaran dari berbagai komponen untuk mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi, cinta terhadap tanah air yang tinggi serta mempunyai rasa bela negara yang tinggi pula.

Keempat, optimalisasi kemampuan deteksi dini dan lapor cepat. Kemampuan intelijen yang dimiliki Koramil Cibinong, harus merupakan kemampuan jaringan intelijen yang dapat melaksanakan deteksi dini guna memberikan informasi untuk mempercepat laporan dan keputusan komando atas dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kemampuan deteksi dini dan cegah dini merupakan tindakan aparat teritorial yang sangat dibutuhkan, agar gejala yang baru muncul di tiap daerah dapat di deteksi, dimonitor dan dilakukan pencegahan sedini mungkin. Oleh karena itu setiap anggota Koramil wajib dibekali pengetahuan intel

dasar, agar mempunyai kemampuan deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat.

Kelima, optimalisasi kemampuan manajemen teritorial. Kemampuan anggota Koramil 2102/Cibinong yang dimiliki adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan dalam bidang manajemen teritorial. Kemampuan manajemen teritorial harus ditingkatkan dan dipelihara secara berlanjut, agar bantuan keamanan yang diminta dapat dilaksanakan seoptimal mungkin dalam mewujudkan stabilitas nasional, peningkatan kemampuan manajemen teritorial didasari atas perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan yang baik pula serta dapat dikendalikan secara optimal.

Keenam, optimalisasi kemampuan penguasaan wilayah. Koramil 2102/Cibinong harus mempunyai kemampuan penguasaan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan profesionalisme, sehingga mempunyai kemampuan dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul setiap saat. Karena sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Dari kondisi tersebut di atas dalam optimalisasi peran Koramil, maka diharapkan seluruh anggota Koramil 2102/Cibinong dapat mendata secara benar dan akurat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Dengan meningkatnya kemampuan penguasaan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, maka setiap prajurit diharapkan dapat mengikuti perkembangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Ketujuh, optimalisasi kemampuan pembinaan perlawanan rakyat. Kemampuan

perlawanan rakyat yang dimiliki, harus merupakan kemampuan pembinaan untuk mendukung peningkatan profesionalisme prajurit melalui pendidikan dan latihan serta meningkatkan pembinaan pada masyarakat untuk membentuk perlawanan rakyat dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul, hal ini diharapkan Koramil 2102/Cibinong dapat mengorganisasikan dengan aparat kelurahan agar dapat melatih rakyat di daerah sebagai salah satu komponen.

Kedelapan, optimalisasi kemampuan komunikasi sosial. Kemampuan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Koramil 2102/Cibinong adalah salah satu kemampuan komando teritorial untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dengan aparat pemerintah di daerahnya sehingga timbul hubungan timbal balik dan tercipta rasa kebangsaan yang tinggi, rasa bela negara dan tumbuh rasa kesatuan dan persatuan yang tinggi. Dalam meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan juga diperlukan optimalisasi kemampuan komunikasi sosial dan kekuatan pasukan agar peran komando teritorial di wilayah dapat lebih optimal sehingga kemanunggalan TNI dan rakyat serta dukungan masyarakat terhadap satuan teritorial semakin terwujud.

Koramil 2104/Citeureup

Pertama, perencanaan, koordinasi dan pengembangan organisasi. Perencanaan dan koordinasi di wilayah Citeureup hampir sama dengan di wilayah Cibinong, dalam perencanaan pemberdayaan wilayah pertahanan diperlukan adanya kejelasan tataran wewenang tahapan manajemen di lingkungan Koramil diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi pada tahap perencanaan. Pelaksanaan tentang

rencana pembuatan dan penggunaan anggaran yang dialokasikan pemberdayaan wilayah pertahanan seringkali tidak transparan.

Personel Koramil 2104/ Citeureup yang ada saat ini belum sesuai dengan anggota yang ada yaitu 29 orang termasuk Danramil, karena Koramil mempunyai 2 kecamatan dan 24 desa yang harus ditempatkan 24 Bintara Babinsa untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayahnya. Pengembangan organisasi Koramil perlu dikembangkan yang disesuaikan dengan adanya pengembangan pemekaran wilayah, sehingga personel Koramil dan Babinsa juga perlu ditambah, dengan harapan tiap 1 desa ada Babinsa 1 orang sehingga dapat bekerjasama dengan kepala desa, dan Babinpol desa. Terutama dalam memonitor perkembangan situasi wilayah terhadap kemungkinan ancaman yang akan datang.

Optimalisasi kemampuan meliputi pembinaan pengetahuan dan keterampilan yang ada pada setiap prajurit maupun satuan. Pembinaan satuan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang ada, dengan harapan kemampuannya lebih meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok yang dibebankan pada perorangan maupun satuan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sehingga kemampuannya dapat dipergunakan setiap saat untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang akan terjadi.

Kedua, gelar satuan. Embrio komponen cadangan yang selama ini disiapkan oleh Koramil adalah sebagian rakyat yang sudah diberikan latihan bela negara dan latihan peraturan baris berbaris (PBB). Langkah yang telah ditempuh ini baru sebatas pemenuhan kuantitas, belum menyentuh masalah kualitas yang diperlukan. Pengerahan

komponen cadangan untuk masuk ke dalam struktur komando teritorial juga belum bisa dilaksanakan karena belum ada aturan dan kejelasan tentang mekanisme yang mengatur hal tersebut.

Pengembangan satuan komando kewilayahan tetap dijaga dalam rangka gelar kewilayahan, karena satuan komando kewilayahan merupakan satuan yang melaksanakan pembinaan wilayah untuk membina potensi masyarakat yang ada di wilayah Koramil dalam rangka mendukung kekuatan pertahanan wilayah, sehingga menjadi kekuatan pendukung dalam mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, pendanaan dan pengendalian program. Dukungan dana untuk Koramil 2104/Citeureup, hakikatnya sama dengan di Koramil 2102/ Cibinong, karena alokasi dukungan anggaran pertahanan untuk satuan di tingkat Koramil sangat minim sekali. Bila dibandingkan dengan dukungan anggaran pertahanan negara lain, dukungan anggaran bagi satuan Koramil adalah yang paling rendah sehingga anggaran untuk komando teritorial tidak mencukupi, padahal tugas yang diemban cukup besar.

Kebijakan pertahanan tentunya memerlukan dukungan anggaran yang rasional namun anggaran satuan kewilayahan untuk alokasi pemberdayaan wilayah pertahanan saat ini masih sangat terbatas, karena dukungan anggaran yang ada hanya sebatas untuk sosialisasi untuk dua instansi saja, padahal sosialisasi pemberdayaan wilayah pertahanan seharusnya dilakukan pada semua komponen masyarakat, pelajar, mahasiswa, birokrasi, karyawan swasta, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga

diharapkan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dimengerti, dipahami dan tumbuh kesadaran dari berbagai komponen untuk mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi, cinta terhadap tanah air yang tinggi serta mempunyai rasa bela negara yang tinggi pula. Pemahaman terhadap sistem pertahanan masih kurang dipahami oleh masyarakat, dikarenakan belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh seluruh warga negara karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka sistem pertahanan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah bersifat semesta.

Keempat, optimalisasi kemampuan deteksi dini dan lapor cepat. Kemampuan intelijen yang dimiliki Koramil Citeureup, harus merupakan kemampuan jaringan intelijen yang dapat melaksanakan deteksi dini guna memberikan informasi untuk mempercepat laporan dan keputusan komando atas alam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kemampuan deteksi dini dan cegah dini merupakan tindakan aparat teritorial yang sangat dibutuhkan, agar gejala yang baru muncul di tiap daerah dapat dideteksi, dimonitor dan dilakukan pencegahan sedini mungkin. Oleh karena itu, setiap anggota Koramil wajib dibekali pengetahuan intel dasar, agar mempunyai kemampuan deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat.

Kelima, optimalisasi kemampuan manajemen teritorial. Kemampuan anggota Koramil 2104/Citeureup yang dimiliki adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan dalam bidang manajemen teritorial. Kemampuan manajemen teritorial harus ditingkatkan dan dipelihara secara berlanjut, agar bantuan keamanan yang diminta dapat

dilaksanakan seoptimal mungkin dalam mewujudkan stabilitas nasional, peningkatan kemampuan manajemen teritorial didasari atas perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan yang baik pula serta dapat dikendalikan secara optimal.

Keenam, optimalisasi kemampuan penguasaan wilayah. Koramil 2104/Citeureup harus mempunyai kemampuan penguasaan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan profesionalisme, sehingga mempunyai kemampuan dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul setiap saat. Karena sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Dari kondisi tersebut di atas dalam optimalisasi peran Koramil, maka diharapkan seluruh anggota Koramil 2104/Citeureup dapat mendata secara benar dan akurat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Dengan meningkatnya kemampuan penguasaan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, maka setiap prajurit diharapkan dapat mengikuti perkembangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Ketujuh, optimalisasi kemampuan pembinaan perlawanan rakyat. Kemampuan perlawanan rakyat yang dimiliki, harus merupakan kemampuan pembinaan untuk mendukung peningkatan profesionalisme prajurit melalui pendidikan dan latihan serta meningkatkan pembinaan pada masyarakat untuk membentuk perlawanan rakyat dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul, hal ini diharapkan Koramil 2104/Citeureup dapat mengorganisasikan dengan aparat kelurahan agar dapat

melatih rakyat di daerah sebagai salah satu komponen.

Kedelapan, optimalisasi kemampuan komunikasi sosial. Untuk meningkatkan komunikasi sosial di Koramil 2104/ Citeureup diperlukan adanya dukungan sarana penggalangan berupa dana atau barang sebagai bahan kontak kepada masyarakat, di samping itu personel Koramil harus menguasai materi yang akan disosialisasikan dan mencari referensi untuk melengkapi materi yang akan disosialisasikan serta mempelajari secara terus menerus tentang kendala sosialisasi pada masyarakat. Karena anggota Koramil kebanyakan bebas dari satuan tempur, maka perlu adanya bimbingan dan arahan serta mendapatkan buku petunjuk yang praktis untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan sosialisasi di masyarakat.

Kemampuan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Koramil 2104/Citeureup adalah salah satu kemampuan komando teritorial untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dengan aparat pemerintah di daerahnya sehingga timbul hubungan timbal balik dan tercipta rasa kebangsaan yang tinggi, rasa bela negara dan tumbuh rasa kesatuan dan persatuan yang tinggi. Dalam meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan juga diperlukan optimalisasi kemampuan komunikasi sosial dan kekuatan pasukan agar peran komando teritorial di wilayah dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas sehingga kemanunggalan TNI dan rakyat serta dukungan masyarakat terhadap satuan teritorial semakin terwujud.

SIMPULAN

Koramil 2102/Cibinong dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah

pertahanan masih terdapat kendala-kendala, kelemahan dan kekurangan, sehingga menyebabkan belum optimalnya peran Koramil dalam melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan yang merupakan salah satu strategi untuk mendukung tugas komando kewilayahan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Koramil harus melaksanakan koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan dalam pembuatan perencanaan, pengembangan organisasi, peningkatan dalam pelaksanaan dan penjabaran 5 (lima) kemampuan teritorial, deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat, manajemen teritorial, penguasaan wilayah dan meningkatkan komunikasi sosial.

Kendala yang dihadapi sebenarnya hampir sama dengan Koramil-Koramil yang lainnya yaitu belum semua warga negara memahami tentang pemberdayaan wilayah pertahanan, maka perlu meningkatkan sosialisasi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan, dan masih banyak kekurangan lainnya seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana, alat transportasi, alat komunikasi dan dana anggaran Koramil yang masih sangat minim, oleh karena itu untuk memantapkan sistem pertahanan negara memerlukan dukungan dari komando atas agar pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan lebih mencapai sasaran. Koramil 2104/Citeureup dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di Kecamatan Citeureup, dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan aparat pemerintah tentang bantuan dan dukungan dalam penyelenggaraan pertahanan.

Koramil 2104/ Citeureup mempunyai wilayah tanggungjawab yang lebih luas dan desa binaannya juga lebih banyak dari Koramil 2102/ Cibinong, sehingga diperlukan pengembangan jumlah personel Babinsa,

penambahan sarana dan prasarana alat transportasi, alat komunikasi dan dana untuk kegiatan pembinaan teritorial.

Selanjutnya, beberapa saran masukan yang diberikan adalah sebagai berikut.

Komando Atas hendaknya segera memfasilitasi kebutuhan Koramil dan Babinsa secara maksimal, baik alat komunikasi, alat transportasi, dana anggaran, sarana dan prasarana operasional serta melengkapi persenjataan sesuai dengan DSPP nya, sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Koramil dapat mewujudkan hasil pemberdayaan wilayah pertahanan secara maksimal.

Perlunya ditingkatkan kualitas personil Koramil 2102/Cibinong dan Koramil 2104/Citeureup dengan memenuhi jumlah personil yang dibutuhkan, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan spesialisasi, seperti suspater, susbater, susbabinsa, dan pengetahuan tentang otonomi daerah, untuk menghadapi kemajuan alat teknologi, transportasi yang sedang berkembang saat ini, agar tugastugas ke depan lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan.

Meningkatkan komunikasi sosial dengan para tokoh-tokoh masyarakat, ormas, orpol dan LSM untuk membantu meningkatkan pemberdayaan potensi sumberdaya nasional yang disiapkan dengan meningkatkan rasa wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat perlawanan rakyat

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat dan unsur terkait dengan melakukan dan memina persatuan kesatuan bangsa, menciptakan kerukunan umat beragama dan menumbuhkan kerukunan umat beragama serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Komando Atas hendaknya segera mengajukan dukungan dana Kodan yang sekarang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) untuk dinaikkan menjadi Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan ujung tombak Koramil dalam mencari data, mendeteksi dini dan cegah dini setiap kejadian yang mengganggu pertahanan wilayah.

Meningkatkan 5 (lima) kemampuan teritorial dalam rangka meningkatkan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui peningkatan deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat, meningkatkan manajemen teritorial, meningkatkan penguasaan wilayah dan meningkatkan pembinaan perlawanan wilayah serta meningkatkan komunikasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Mabesad. 2005. *Bujuknik tentang Latihan Satuan Komando Kewilayahan. No.201.05-111116. PT. Ter-10. Skep Kasad Nomor Skep/105/V/2005.* Jakarta: 3 Mei 2005.
- _____. 2006. *Bujuknik tentang Penyiapan Satuan Komando Kewilayahan. No. 203.0207. PT: OPS-03. Skep Kasad Nomor Skep/29/II/2006.* Jakarta: 7 Pebruari 2006
- _____, 2007. *Bujuklak tentang Manajemen Operasi. Nomor : PP Inf-11. Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/118/IX/2007.* Jakarta: 10 September 2007.
- Pusat Teritorial TNI AD. 2000. *Buku Petunjuk Pembinaan tentang Binter. PB: TER-01. Skep Danpuster TNI AD Nomor Skep/175/IV/2000.* Jakarta. 14 April 2000.
- Samego, Indria. 2001. *Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi.* Jakarta: Penerbit The Habibie Center.

Suradinata, Ermaya, 1996. *Pembinaan Potensi Masyarakat dan Sistem Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Strategi Penyelenggaraan Sistem*

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Bandung: CV. Ramadhan

Wawancara dengan:

1. Serka Mulyono, Koramil Cibinong